BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.

Salah satu Penyumbang dana APBN terbesar adalah Pajak dan Migas, seperti yang di ungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani “APBN berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp 32,6 triliun atau sebesar 45 persen dan Rp 39,1 triliun atau 55 persen untuk pendapatan nonpajak”. (Sri Mulyani : 2009). Selain itu ada juga pendapat dari Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin “Sumber APBN yang terbesar berasal dari sektor pajak, bukan dari minyak dan gas lagi”.(InfoJambi.com)

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan–kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi–

instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Hal ini bukanlah perkara gampang, karena disamping peran aktif dari petugas pajak, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tidak terlepas dari minimnya pengetahuan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Sikap atau persepsi wajib pajak yang cenderung menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia, juga merupakan faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Ekstensifikasi dan intenifikasi bisa dilakukan dengan reformasi pajak. (Nila yulianawati,2011)

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu system yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus wajib pajak maupun bagi wajib pajak. System pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. System pemungutan yang berlaku adalah self assessment system, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui proedur pemeriksaan. (Siti Kurnia Rahayu,2010).

Masalah tunggakan pajak (kepatuhan pajak) adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keiginan untuk melakukan tindakan penghindran, pengelakan, penyelundupan, dan penilaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. (Siti kurnia rahayu,2010).

Masalah tunggakan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi salah satu masalah yang terjadi pada 14 perusahaan minyak dan gas (migas) asing. Seperti yang dikemukakan oleh wakil ketua KPK Hartoyo Umar beliau mengatakan sudah beberapa bulan sejak kita umumkan ke publik, 14 perusahaan itu masih belum menunaikan kewajibannya. Bahkan 14 perusahaan yang tidak pernah bayar pajak, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sejak lima kali mentri keuangan berganti. Dari tunggakan pajak tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara diperkrakan mencapai angka 1.6 triliunan rupiah. Pihak KPK pun mempertanyakan kinerja Dirktoran Jendral Pajak tentang hal ini.(Hartoyo Umar,2011).

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sendiri masalah tunggakan pajak sering terjadi salah satu penyebabnya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga harus di berikan STP (surat tagihan pajak) oleh pihak KPP. Di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees sendiri setiap tahunnya

penerbitan STP dari tahun ke tahun semakin meningkat seperti pada wajib pajak badan sendiri tahun 2010 ditebitkan sebanyak 52 STP dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 104 STP.

Dari 52 STP yang diterbitkan pada tahun 2010 sekitar 50% dari STP tersebut di abaikan oleh wajib pajak sehingga pihak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees harus menerbitkan surat peringatan, surat paksa dan surat penyegelan. Jika wajib pajak tersebut masih belum menanggapi atau tunggakan pajaknya masih belum di bayar, pihak KPP bisa melakukan pemblokiran rekening wajib pajak seperti yang dijelaskan pada KMK.563/KMK.04/2000 tentang pemblokiran.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tindak lanjut dari urat tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dan menjadikan sebagai objek laporan kerja praktek dengan judul **"Tinjauan Atas Tindak Lanjut dari Surat Tagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees."**

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut dari surat tagihan pajak dan mengetahui prosedur penagihan dengan cara pemblokiran.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak lanjut dari surat tagihan pajak di KPP Karees
2. Untuk mengetahui prosedur pemblokiran yang ada d KPP Karees

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

a. Pihak Dirjen Pajak

Laporan Kerja Praktek sebagai bahan masukan atau bahan analisis dalam memperbaiki kekurangan dalam tindak lanjut dari surat tagihan pajak penagihan pajak dan pemblokiran.

2. Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil Kerja Praktek merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan tentang surat tagiahan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil ini berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sumber penelitian yang berguna bagi peneliti lain yaitu mengetahui tentang tindak lanjut dari surat tagiha pajak di KPP Pratama bandung Karees.

1.3 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees ini adalah *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu :

a. Pengamatan (*Observaion*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

b. Wawancara *(Interview*)

Penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Karees Kota Bandung pada bagian PDI yang bertempat di Jl. Ibrahim Adjie. 76 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan, terhitung dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011. Waktu kerja praktek adalah hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

Tabel 1.1

Waktu Kerja Praktek

NO.	KEGIATAN	BULAN																			
		JUN		JUL				OKT				NOV				DES				JAN	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Mengajukan permohonan KP																				
2	Mencari tempat KP																				
3	Pelaksanaan KP																				
4	Mengajukan judul																				
5	Mencari data laporan KP																				
6	Pengelolaan data																				
7	Membuat laporan KP																				
8	Bimbingan laporan KP																				
	a. Judul																				
	b.BAB I																				
	c. BAB II																				
	d.BAB III																				

e.BAB IV